

**PENGARUH EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Periode 2021-2023)**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Dian Hapsari

NIM: 31402200132

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEMARANG**

2025

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Periode 2021-2023)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Dian Hapsari

NIM: 31402200132

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEMARANG**

2025

SKRIPSI

**PENGARUH EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Periode 2021-2023)**

Disusun Oleh:

Dian Hapsari

NIM: 31402200132

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 07 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt

NIK : 211406020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Periode 2021-2023)**

**Disusun Oleh:
Dian Hapsari
NIM: 31402200132**

Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tanggal 21 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,

 2024.07.08
18:14:55
+07'00'

Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt
NIK : 211406020

Penguji 1,



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP
NIK: 211492003

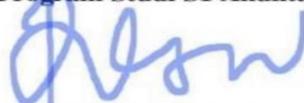
Penguji 2,



Dr. Luluk Muhimatul Ifada, SE, M.Si, Ak, CA, CRSA, CSRS
NIK: 210403051

Usulan Penelitian untuk Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 21 Juni 2024.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak. CA., IFP., AWP
NIK: 211403012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Periode 2021-2023)**

**Disusun Oleh:
Dian Hapsari
NIM: 31402200132**

Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tanggal 26 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt
NIK : 211406020

Penguji 1,

6 Mar 2025



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP
NIK: 211492003

Penguji 2,

Prof. Dr. Luluk Muhamatul Ifada, SE, M.Si, Ak, CA, CRSA, CSRS

NIK 210403051

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
mempertahankan Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 26 Februari 2025.



Ketua Jurusan Studi S1 Akuntansi,

Prayita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFR., Ph.D
NIK: 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Hapsari
NIM : 31402200132
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **“Pengaruh efektivitas dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*”**. Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Dian Hapsari

Nim. 31402200132

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dian Hapsari
NIM	: 31402200132
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : **“Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR), (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Maret 2025

Yang menyatakan,



Dian Hapsari

NIM :31402200132

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”.



PERSEMBAHAN:

Penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak, ibu, dan adik tercinta
3. Keluarga dan teman-teman penulis
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Unissula yang telah memberikan ilmu bermanfaat.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam beserta sahabatnya, sehingga dapat diselesaikannya Skripsi ini oleh penulis dengan judul: **“Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)”**

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Islam Sultan Agung Semarang.

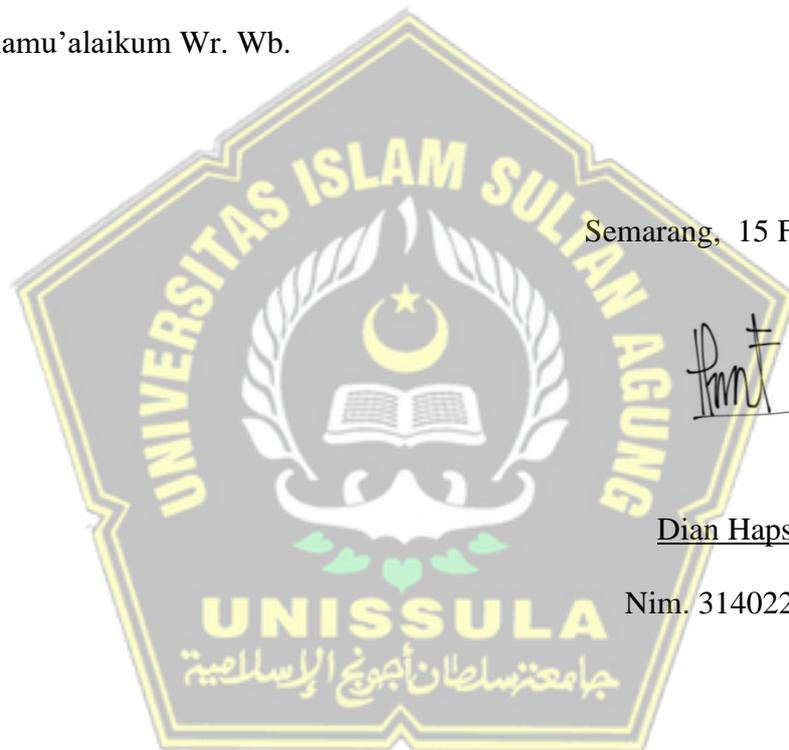
Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap rasa hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt., Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sabar membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penelitian sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si, Ak, CA, Asean CPA, CRP dan ibu Prof. Dr.Luluk Muhimatul Ifada, SE, M.Si, Ak, CA, CRSA, CSRS Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran berharga terkait penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kekeliruan dalam penulisan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan.
6. Kedua Orang Tua saya (Bapak Janudi dan Ibu Sakiyem) yang selalu memberikan do'a dan dukungan material.
7. Adikku Tersayang Dwi Novita Sari terima kasih untuk semuanya dan sukses selalu, dilancarkan segala urusannya. Aamiin.
8. Segala pihak yang telah memberikan bantuan namun tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.
9. Terakhir, kepada seseorang yang telah meninggalkan luka di hati saya selama proses penyusunan skripsi ini. Ternyata kepergian Anda dari kehidupan saya justru menjadi pendorong yang cukup kuat bagi saya untuk terus melangkah maju dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita di akhir perjalanan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Sebagai penutup, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 15 Februari 2025

Dian Hapsari

Nim. 31402200132

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak efektivitas Dewan Komisaris, peran Komite Audit, serta proporsi kepemilikan manajerial dan institusional terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Objek penelitian mencakup 85 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda guna mengidentifikasi keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial berkontribusi positif terhadap implementasi CSR, menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan institusional tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan CSR. Temuan ini menegaskan bahwa kepemilikan manajerial berperan sebagai faktor utama dalam mendorong peningkatan pelaporan CSR, sementara mekanisme tata kelola perusahaan lainnya tidak secara langsung memengaruhi keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen perusahaan dalam mengelola CSR sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Corporate governance.*

ABSTRACT

This research aims to examine the impact of the effectiveness of the Board of Commissioners, Audit Committee, Managerial Ownership, and Institutional Ownership on Corporate Social Responsibility (CSR). The study sample consists of 85 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023, selected using a purposive sampling method. A quantitative approach is employed, utilizing multiple linear regression analysis to assess the relationship between the independent and dependent variables. The findings reveal that managerial ownership positively influences CSR, indicating that a higher level of managerial ownership leads to greater corporate engagement in social responsibility initiatives. In contrast, the effectiveness of the Board of Commissioners, Audit Committee, and Institutional Ownership does not significantly affect CSR. These results highlight that managerial ownership plays a crucial role in enhancing CSR disclosure, whereas other corporate governance mechanisms do not directly impact corporate participation in social responsibility. This study underscores the importance of increasing corporate awareness and commitment to integrating CSR into a sustainable business strategy.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Board of Commissioners, Audit Committee, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Corporate governance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Grand Theory.....	13
2.1.1 Teori Legitimasi	13
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	14
2.1.2 <i>Good corporate governance</i> (GCG).....	16
2.1.3 Dewan Komisaris	20
2.1.4 Komite Audit.....	22
2.1.5 Kepemilikan Manajerial.....	24
2.1.6 Kepemilikan Institusional	25
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis	29
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	29
2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	30
2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	31

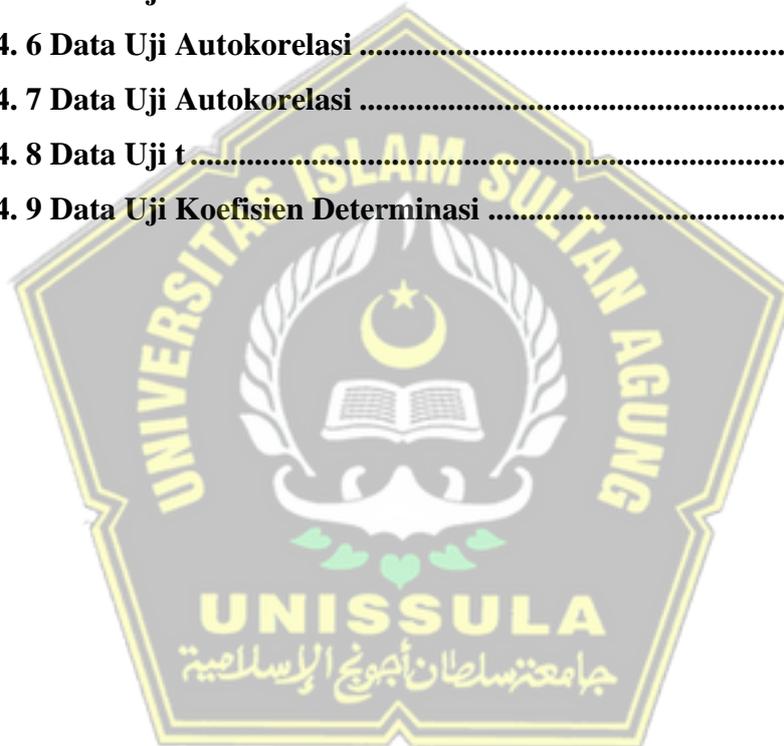
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	32
2.4. Kerangka Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel.....	34
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	35
3.4 Metode Pengumpulan data	35
3.5 Variabel dan Indikator.....	36
3.5.1 Variabel Dependen.....	36
3.5.2 Variabel Independen.....	37
3.6 Teknik Analisis.....	38
3.6.1 Statistik Deskriptif	38
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	41
3.6.4 Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Sampel PenelitianObjek Penelitian	43
4.2 Deskripsi Variabel	44
4.3 Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1 Uji Normalitas	46
4.3.2 Uji Multikolinieritas	47
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.3.4 Uji Autokorelasi	49
4.4 Analisis Uji Regresi Linear Berganda.....	49
4.5 Pengujian Hipotesis	51
4.6 Pengujian Koefisien Determinasi	54
4.7 Pembahasan.....	55
4.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> 55	
4.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>	56
4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>	57
4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>	58

BAB V PENUTUP.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	43
Tabel 4. 2 Data Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 3 Tabel Data Uji Normalitas	46
Tabel 4. 4 Data Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4. 5 Data Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4. 6 Data Uji Autokorelasi	49
Tabel 4. 7 Data Uji Autokorelasi	50
Tabel 4. 8 Data Uji t.....	51
Tabel 4. 9 Data Uji Koefisien Determinasi	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan liberalisasi pasar, perusahaan dituntut untuk secara aktif dan transparan melaporkan tanggung jawab sosial mereka. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, mereka menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis, terutama dalam menjalankan praktik usaha yang bertanggung jawab sesuai dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seiring dengan perubahan dinamis dalam dunia bisnis, kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial semakin meningkat. Berdasarkan Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; “perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari komitmen perusahaan”.

Dalam upaya memenuhi peraturan yang berlaku dan menjamin keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, perusahaan mengambil langkah strategis dalam menyampaikan tanggung jawab sosialnya. CSR dianggap sebagai alat untuk menciptakan keunggulan merek, mendapatkan izin operasional dari pemerintah dan masyarakat, serta menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak

hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga komponen penting dalam strategi bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perusahaan manufaktur memiliki peran signifikan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

CSR menjadi topik penting di kalangan stakeholders saat membahas dampak sosial dari aktivitas bisnis. Kurangnya kepercayaan karyawan terhadap CSR sering kali muncul karena perusahaan belum menunjukkan komitmen penuh, dan stakeholders meyakini bahwa kepercayaan dapat dibangun melalui operasional bisnis yang etis, terbuka, bertanggung jawab, serta pelaksanaan CSR yang konsisten. Intinya, CSR yakni bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh pelaku bisnis untuk mengutamakan tindakan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, termasuk karyawan perusahaan.

Setiap bisnis didirikan untuk menjalankan aktivitasnya dan memperoleh keuntungan dari investasi di pasar saham. Hal ini hanya dapat tercapai melalui pendekatan yang efisien dan efektif, dengan memanfaatkan potensi organisasi secara maksimal untuk menghadapi tantangan teknologi modern dan masyarakat yang kritis serta melek informasi. Selain menjalankan operasional dan mencari laba, perusahaan juga perlu mengelola isu-isu sosial yang terkait, atau bahkan menciptakan peluang baru jika tidak ada potensi yang cukup untuk memaksimalkan keuntungan melalui kemitraan atau kerja sama. Aktivitas individu dalam perusahaan dapat menghasilkan dampak yang

berbeda-beda, meskipun operasionalnya serupa, yang memengaruhi *Corporate Social Responsibility* di tempat individu tersebut bekerja. Variasi praktik CSR antar organisasi terletak pada cara pelaporan *Corporate Social Responsibility*. Entitas dengan karakter kuat mampu memberikan dampak sosial yang positif dan dukungan berkelanjutan kepada masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi perlu memberikan perhatian khusus terhadap publikasi kegiatan tanggung jawab sosial mereka, karena citra perusahaan di mata masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat penjualan. Dalam industri ini, transparansi mengenai program CSR menjadi salah satu cara untuk menunjukkan komitmen terhadap kepentingan sosial, yang pada akhirnya dapat memperkuat reputasi perusahaan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Walaupun implementasi CSR tidak serta-merta mendatangkan keuntungan finansial secara langsung, penyampaian informasi terkait program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat hubungan dengan konsumen, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi perkembangan usaha di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012; “perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau bidang terkait diberi mandat untuk melaksanakan program CSR”. Kewajiban ini wajib, dan setiap pelanggaran dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa CSR melampaui

inisiatif sukarela belaka; ini merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Safitry, Indra, & Agustina, 2022).

Meskipun *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus berkembang, sebagian pelaku bisnis masih menganggapnya sebagai beban finansial yang dapat mengurangi keuntungan (Darmawan, 2018). Namun, jika dipandang sebagai investasi strategis untuk keberlanjutan, CSR dapat memberikan keuntungan jangka panjang (Said, 2018). Di banyak negara, pelaporan CSR telah menjadi praktik standar dan bahkan menjadi indikator penilaian kinerja perusahaan, dengan kewajiban untuk mencantumkannya dalam laporan keuangan (Fauzan & Kustinah, 2019). Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat dan investor untuk mengevaluasi kontribusi sosial perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap keberlanjutan bisnis.

Untuk menegakkan dan meningkatkan nilai perusahaan, entitas bisnis harus menunjukkan komitmen yang teguh terhadap tanggung jawab sosial melalui pengungkapan tahunan mereka. Keberhasilan realisasi CSR secara signifikan bergantung pada kerangka tata kelola yang kuat. Menurut Pedoman Tata Kelola Perusahaan Umum Indonesia, tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk memperkuat kesadaran mengenai isu-isu sosial dan lingkungan. Struktur tata kelola yang efisien menanamkan kepercayaan pada investor bahwa investasi mereka akan menghasilkan pengembalian yang adil (Ariani, 2018). Implementasi GCG yang efektif dan kesadaran akut akan tanggung jawab

sosial sangat penting dalam mempertahankan hubungan antara perusahaan dan konteks sosialnya. Perusahaan harus menyadari segudang faktor, termasuk keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan tenaga kerja, interaksi bisnis, keterlibatan masyarakat, investasi sosial, serta transparansi dalam penyebaran informasi. CSR terkait erat dengan prinsip akuntabilitas dalam GCG, yang mencerminkan keseriusan perusahaan melakukan operasinya demi kepentingan pemegang sahamnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tercermin dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2007. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menuntut laporan terkait aktivitas tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh manajemen (Asahra & Pesudo, 2023).

Belakangan ini, CSR semakin menjadi fokus utama, terutama bagi perusahaan yang ingin memastikan keberlanjutan dan dukungan masyarakat. CSR tidak lagi dipandang hanya sebagai pengeluaran, tetapi sebagai investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap lingkungan, semakin positif pandangan publik, yang membuat perusahaan dengan reputasi baik lebih menarik bagi investor dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga berkontribusi pada keuntungan. *Good corporate governance* (GCG), atau pengelolaan perusahaan, adalah sistem yang mengatur dan mengawasi operasional perusahaan (Sofyan, 2021). Sistem ini memastikan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara direksi, komisaris, komite audit, manajer, dan

stakeholders. Dewan komisaris bertugas memastikan tata kelola berjalan baik, termasuk penerapan CSR kepada stakeholders. Menurut Komite Nasional Kebijaksanaan Governance, CSR adalah prinsip pengelolaan perusahaan yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan dan undang-undang, sambil bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan demi keberlanjutan bisnis dan pengakuan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (Rivandi & Putra, 2019).

Sebagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan, komite audit berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan untuk memperkuat efektivitas kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh dewan komisaris. Pelaporan tanggung jawab sosial berkontribusi dalam proses evaluasi serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Komite audit juga bertanggung jawab dalam meninjau kinerja perusahaan, berkoordinasi dengan auditor eksternal dan independen, serta mendukung fungsi audit internal untuk menjamin keakuratan laporan keuangan. Dengan wewenang yang diberikan oleh dewan komisaris, komite audit dapat menjalankan tugasnya secara optimal, baik dalam aspek keuangan maupun sosial perusahaan (Rivandi & Putra, 2019).

Menurut Mathiesen, kepemilikan manajer adalah persentase suara dan saham yang dimiliki oleh manajer dan direksi di luar peran mereka sebagai pemegang saham. Kepemilikan insider ini memengaruhi perilaku manajemen,

dan menurut Jensen, dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi perusahaan (Ariani, 2018). Kepemilikan saham oleh pemegang saham dan manajemen membantu mengatasi konflik kepentingan, memberikan manfaat dari keputusan manajemen, meskipun manajemen tetap bertanggung jawab atas keputusan yang keliru (Prasetyo, 2023).

Beragam lembaga, termasuk yayasan, perbankan, perusahaan asuransi, institusi investasi, dana pensiun, serta badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), berperan sebagai pemilik institusional. Kepemilikan ini memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan investor perorangan, mengingat kapasitas sumber daya yang mereka miliki jauh lebih besar. Dominasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan manajerial (Ariani, 2018). Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi lebih peka terhadap kontrak sosial dan legitimasi dari stakeholders, memengaruhi kinerja, termasuk aspek sosial. Lembaga yang memiliki dominasi kuat mampu mengelola manajemen dengan lebih ketat. Selain itu, kepemilikan institusional yang lebih besar cenderung meningkatkan dorongan untuk menyampaikan laporan terkait tanggung jawab sosial (Qur'anie, 2019).

Asahra dan Pesudo (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberadaan Dewan Komisaris berperan dalam mendorong peningkatan pelaksanaan CSR. Sebaliknya, unsur tata kelola lainnya, seperti Komite Audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan kelembagaan, tidak menunjukkan

pengaruh yang berarti terhadap CSR. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti dan Eriandani (2022), yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi implementasi CSR di suatu perusahaan. Sementara itu, investigasi oleh Hindriani (2017) dan Rivandi (2020) mengidentifikasi bahwa kepemilikan manajerial berkontribusi positif terhadap CSR, sementara kepemilikan kelembagaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Lebih lanjut, temuan Rivandi dan Putra (2019) menunjukkan bahwa Komite Audit berdampak positif terhadap CSR, sedangkan Dewan Komisaris tidak memberikan pengaruh apapun. Prasetyo (2023) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan kelembagaan berdampak positif terhadap CSR, sedangkan kepemilikan manajerial tetap tidak signifikan.

Penelitian ini menyimpang dari studi anteseden sehubungan dengan durasi pengamatan. Berbeda dengan Asahra dan Pesudo (2023), yang berkonsentrasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 hingga 2020 dalam karya ilmiah mereka berjudul “Dampak Efektivitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Kelembagaan terhadap Tanggung Jawab Soal Perusahaan,” investigasi saat ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 2021 hingga 2023. Analisis ini mencakup dampak kemandirian Dewan Komisaris, Komite Audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan kelembagaan terhadap Tanggung Jawab Soal Perusahaan (CSR) dalam entitas manufaktur sepanjang jangka waktu yang ditentukan. Dengan

memperluas ruang lingkup temporal, penelitian ini bercita-cita untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor-faktor intrinsik yang mengatur CSR. Populasi lengkap perusahaan manufaktur yang didokumentasikan dalam BEI digunakan sebagai sumber data untuk penyelidikan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat penjelasan sebelumnya, para sarjana telah melihat perbedaan dalam temuan di seluruh studi sebelumnya yang berkaitan dengan dampak dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan kelembagaan pada CSR. Akibatnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini diartikulasikan sebagai berikut: “Sejauh mana efektivitas dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan kelembagaan mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR)?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan pada studi ini dirinci seperti berikut:

1. Apakah efektivitas dewan komisaris berdampak kepada *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Apakah terdapat faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah kepemilikan manajerial berdampak pada *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

4. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis hal-hal berikut:

1. Dampak efektivitas dewan komisaris terhadap CSR.
2. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komite audit terhadap CSR.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial pada CSR.
4. Pengaruh kepemilikan institusional pada CSR.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori, khususnya dalam disiplin akuntansi, dengan memperkaya wawasan akademik dan memperdalam pemahaman konseptual. Selain itu, hasil penelitian ini juga berperan dalam memperluas cakrawala keilmuan serta menguatkan basis pengetahuan bagi studi-studi selanjutnya. Lebih dari itu, penelitian ini menjadi sarana aplikatif dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama proses pembelajaran, sehingga ilmu yang didapatkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal penelitian dan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a. Pada Organisasi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi serta menyusun kebijakan yang lebih optimal bagi perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Khususnya, temuan ini berkontribusi dalam memperkuat penerapan GCG serta mendorong implementasi program CSR secara lebih efektif.

b. Pada Peneliti Mendatang

Studi ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang berencana mendalami penelitian dengan tema sejenis, serta berfungsi sebagai sumber wawasan tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Legitimasi

Dalam bidang kajian akuntansi, teori legitimasi menjadi landasan untuk memahami konsep keterbukaan perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosial serta pengaruhnya terhadap lingkungan (Titisari, 2020). Untuk dapat terus menjalankan operasinya, perusahaan perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar, yang diwujudkan melalui legitimasi sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh legitimasi menurut Titisari (2020):

1. Perusahaan secara konsisten berupaya meningkatkan imbal hasil saham bagi investor sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari mereka.
2. Perusahaan terus meningkatkan kualitas produk, standar pelayanan, dan kepuasan pelanggan demi memperoleh legitimasi dari konsumen.
3. Perusahaan mematuhi regulasi dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi dari otoritas berwenang.
4. Perusahaan menjalankan operasi bisnis dengan mengedepankan tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan mencerminkan penerapan teori legitimasi. CSR berfungsi sebagai strategi untuk mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat. Selanjutnya,

inisiatif CSR mewujudkan dedikasi organisasi terhadap akuntabilitas sosial dan lingkungan, yang mana berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) pada hakikatnya ialah manifestasi dari komitmen yang dimiliki oleh perusahaan. Komitmen ini menggambarkan kewajiban perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung kemajuan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan di sekitar lokasi operasionalnya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai program sosial yang dirancang untuk memberikan manfaat positif bagi komunitas sekitar (Widyatmojo et al., 2023). Menurut Meutia (2021), pelaporan CSR digunakan oleh manajemen sebagai alat komunikasi dengan publik guna membangun citra positif di masyarakat. Biasanya, pelaporan ini disajikan dalam dokumen seperti laporan *Corporate Social Responsibility*, laporan sumber daya manusia, serta laporan kesehatan dan keselamatan kerja.

Menurut Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 26000 tahun 2010, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan bersifat diskresioner dan tidak merupakan mandat di negara mana pun, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam konteks Indonesia, UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3); “mencirikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan untuk mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan”. Tujuan utama dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, menghasilkan manfaat bagi perusahaan,

masyarakat lokal, dan masyarakat pada umumnya. Mardikanto (2018) menjelaskan bahwa CSR merupakan kerangka kerja di mana organisasi secara sukarela memasukkan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis sambil terlibat dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, Rusmana et al. (2019) menegaskan bahwa CSR menandakan perhatian perusahaan kepada para pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berusaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan standar lingkungan sambil mengurangi dampak buruk dari kegiatan perusahaan.

Dari eksposisi ini, dapat disimpulkan bahwa CSR melambangkan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui berbagai tindakan konkret, langsung ataupun tidak. Informasi mengenai implementasi CSR umumnya dipublikasikan melalui berbagai dokumen, seperti laporan keberlanjutan, laporan manajemen sumber daya manusia, serta laporan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Keberadaan CSR memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara simultan demi menciptakan manfaat bersama.

Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah ditetapkan dalam (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas untuk menyelenggarakan program CSR serta menyediakan anggaran khusus guna mendukung pelaksanaannya. CSR menjadi aspek penting yang harus

diberikan perusahaan kepada masyarakat atau lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Saat ini, CSR tidak hanya berfungsi sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya melindungi perusahaan dari risiko hukum, kehilangan mitra bisnis, serta penurunan reputasi akibat globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan keterbukaan pasar (Ilmu, dkk, 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) berperan penting dalam mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, kewarganegaraan perusahaan yang bertanggung jawab, dan praktik bisnis yang etis dalam kerangka organisasi. Pelaksanaan inisiatif CSR memungkinkan korporasi untuk melampaui fokus belaka pada kepentingan pemegang saham, sehingga memenuhi kebutuhan beragam dari semua pemangku kepentingan (Ilmu, et al, 2022).

Global Reporting Initiative (GRI) berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. GRI adalah entitas otonom yang memfasilitasi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menghitung secara sistematis dampak sosial dan lingkungan mereka melalui standar pelaporan yang diakui secara universal. Sebagai kerangka kerja pelaporan keberlanjutan, standar GRI telah direvisi untuk mencerminkan Standar GRI 2018, menggantikan Standar GRI 2016 yang sekarang sudah usang. Iterasi kontemporer ini menggabungkan komponen pelaporan baru yang memulai implementasi efektif pada tahun 2021.

2.1.2 Good corporate governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan struktur manajemen perusahaan yang menekankan hubungan dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menetapkan arah strategis dan metrik kinerja organisasi (Lumentut, 2022). Kerangka kerja ini merangkum interaksi dinamis antara para pemangku kepentingan dalam kontinum pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan. Komponen fundamental tata kelola mencakup pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi, sementara pihak terkait tambahan termasuk karyawan, pemasok, klien, lembaga keuangan, badan pengatur, entitas masyarakat, dan pertimbangan lingkungan (Hery, 2023).

Menurut Choughri (2018), pengelolaan risiko dalam organisasi dapat dicapai dengan mengintegrasikan *Good corporate governance* dan praktik manajemen risiko terbaik ke dalam budaya organisasi. Dengan kata lain, penerapan GCG menjadi kunci keberhasilan, dan perusahaan perlu menjadikan GCG sebagai prioritas untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Menurut Hamim, Anggreini, dan Azmy (2019), tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi jalannya bisnis secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, berdasarkan perspektif Cadbury Committee of UK serta Sudarmanto dkk. (2021:73), GCG berfungsi sebagai sistem yang mengoordinasikan hubungan antara manajemen perusahaan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku

kepentingan lainnya, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan utama dari penerapan mekanisme ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Selain itu, GCG juga berfungsi sebagai sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko besar, melindungi aset perusahaan, dan mendukung peningkatan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dari perspektif ini, gagasan utama bahwa GCG ialah proses manajemen perusahaan yang menumbuhkan hubungan sinergis dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam perumusan tujuan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai organisasi, sementara secara bersamaan menangani persyaratan pemangku kepentingan, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitarnya. Pemberlakuan GCG muncul sebagai faktor penting dalam keberhasilan organisasi perusahaan, yang mengharuskan prioritas untuk memenuhi tujuan kelembagaan yang optimal.

Good corporate governance memainkan peran strategis dalam sektor ekonomi, mirip dengan sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Saat ini, penerapan prinsip tata kelola yang baik bukan lagi sekadar kebutuhan normatif, melainkan menjadi elemen wajib bagi setiap perusahaan dan organisasi. Keberadaan GCG membantu meningkatkan nilai perusahaan, mendukung keberlanjutan operasional dalam jangka panjang, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek masa depan perusahaan. Di Indonesia, Komite Nasional *Corporate governance* didirikan pada tahun

1999 dengan mengadopsi Kode *Good corporate governance*, yang direvisi pada tahun 2006 untuk menghasilkan regulasi baru bagi perusahaan (Sari, dkk, 2021).

Tata kelola perusahaan adalah kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemanjuran operasional perusahaan dengan meneliti kinerja yang dimiliki oleh manajemen dan meneliti kepastian akuntabilitas para pemangku kepentingan selaras dengan kerangka peraturan yang ada. Konsep ini dibuat untuk mengembangkan sistem manajemen yang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan yang relevan. Aparat tata kelola perusahaan berfungsi sebagai perlindungan yang efektif bagi pemegang saham, menghasilkan kepercayaan pada pengembalian investasi yang adil. Selain itu, tata kelola perusahaan kondusif untuk membina lingkungan yang mendorong pertumbuhan yang efisien dan berkelanjutan dalam sektor perusahaan (Tjondro, et al, 2011).

Menurut Prananta (2020), *Corporate governance* terdiri dari lima prinsip utama:

1. Transparansi (Transparency) merupakan kemudahan akses informasi yang terbuka saat pengambilan keputusan serta penyajian data terkait aktivitas perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability) mengacu pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggungjawaban direksi, dewan komisaris, dan RUPS dalam memastikan efektivitas pengelolaan perusahaan.

3. **Responsibilitas (Responsibility)** adalah pengelolaan perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Independensi (Independency)** mengacu pada pengelolaan yang dilakukan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau pengaruh eksternal yang berpotensi merugikan perusahaan.
5. **Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)** menitikberatkan pada pemberian perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.

2.1.3 Dewan Komisaris

Seorang komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan jajaran direksi perusahaan, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan internal. Kehadiran mereka merupakan syarat yang diperlukan untuk menjamin bahwa resolusi yang dibuat tidak memihak dan obyektif, tanpa pengaruh yang berasal dari hubungan pribadi atau profesional dengan sesama komisaris, direktur, pemegang saham signifikan, atau entitas perusahaan itu sendiri (Salemba, 2023).

Dalam struktur perusahaan, dewan komisaris mewakili kepentingan stakeholders yang dilindungi hukum sesuai ketentuan perseroan terbatas. Tugas utamanya adalah mengawasi pengelolaan perusahaan oleh direksi dan memastikan manajemen menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk dalam pengembangan sistem pengendalian internal. Sebagai wakil

prinsipal, dewan komisaris memengaruhi cakupan pelaporan tanggung jawab sosial sebagai pengawas tertinggi di perusahaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 6 menggambarkan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan operasional yang komprehensif terhadap organisasi atau aspek-aspek tertentu sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar, sementara juga memberikan rekomendasi kepada direktur eksekutif. Melawati dkk. (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kinerja perusahaan dan memberikan panduan strategis untuk memfasilitasi peningkatan pengambilan keputusan; meskipun tidak memiliki wewenang langsung atas usaha operasional, namun memastikan integritas informasi yang terkandung dalam laporan kinerja yang disampaikan oleh direksi.

Zarkasyi (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah badan yang bertugas mengawasi kebijakan dan operasional direksi, memastikan keselarasan dengan anggaran dasar, serta memberikan panduan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Dari pandangan para ahli ini, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris merupakan elemen kunci pada struktur perusahaan dan memiliki tugas sebagai pengawas yang memberi saran kepada direksi. Sebagai perwakilan pemilik, mereka memengaruhi pelaporan tanggung jawab sosial, meskipun tidak memiliki otoritas langsung dalam keputusan operasional.

Berdasarkan Pasal 114 Ayat 1, dewan komisaris wajib mengawasi kegiatan perseroan, termasuk kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan operasional secara keseluruhan, serta memberikan arahan kepada direksi agar keputusan sesuai dengan tujuan perseroan. Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa tanggung jawab dewan komisaris didasarkan pada prinsip kepercayaan (fiduciary duties), yang juga berlaku serupa bagi direksi.

Dalam kapasitas otoritatifnya, dewan komisaris memainkan peran penting dalam memberikan insentif kepada manajemen untuk mengungkapkan kegiatan CSR. Peningkatan keanggotaan dalam dewan komisaris berkorelasi positif dengan ruang lingkup pelaporan CSR yang lebih luas dalam pengungkapan tahunan. Pengaruh mereka sebagai pengawas operasional memungkinkan mereka untuk mendorong manajemen untuk mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dalam penyajian informasi CSR, sehingga perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih luas cenderung memberikan laporan yang lebih rinci tentang inisiatif tanggung jawab sosial mereka (Subiantoro & Mildawati, 2015).

2.1.4 Komite Audit

Komite audit ialah kumpulan anggota dewan yang ditunjuk untuk membantu auditor independen dalam menilai kinerja manajerial. Komposisi komite ini termasuk direktur yang tidak terlibat dalam manajemen operasional perusahaan. Peran fundamentalnya adalah menemani dewan komisaris dalam

mengawasi kegiatan perusahaan dan memfasilitasi komunikasi antara dewan komisaris dan auditor untuk mencapai tujuan bersama (Hantono et al., 2019).

Menurut Fitri, Hamrul, dan Anita (2020), komite audit menjalankan fungsi memotivasi manajemen untuk menjalankan bisnis secara bijaksana melalui peran pengawasan, menjaga kepentingan eksternal organisasi terhadap potensi penyimpangan manajerial, dan berfungsi sebagai landasan untuk kemajuan bisnis. Oleh karena itu, komite audit mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance. Menurut Effendi (2016), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai entitas independen dan profesional yang dibentuk oleh dewan direksi. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk memperkuat peran pengawasan dewan komisaris, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan audit, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam Surat Edaran (SE-03/PM/2000), mendorong setiap perusahaan terbuka untuk membentuk komite audit guna memperkuat akurasi laporan keuangan serta meningkatkan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite ini harus terdiri dari setidaknya tiga anggota yang dipilih oleh dewan komisaris, dengan salah satu di antaranya ditetapkan sebagai ketua. Kehadiran komisaris independen dan komite audit sangat terkait dengan tanggung jawab pengawasan dewan komisaris, memfasilitasi pelaksanaan proses audit yang mulus dan evaluasi laporan keuangan untuk publik. Komite audit diberi mandat untuk melakukan

objektivitas dalam meneliti potensi ketidakakuratan dan mengidentifikasi pelanggaran yang berkaitan dengan keputusan direktur.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris membentuk komite audit sebagai sebuah kelompok yang berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta meningkatkan efektivitas pengendalian dalam operasional manajerial. Komite ini biasanya terdiri dari 3-7 direktur yang tidak mengambil bagian dalam manajemen perusahaan.

Audit internal didefinisikan sebagai kegiatan independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki struktur organisasi, meningkatkan efektivitas proses risiko, pengendalian, dan tata kelola. Menurut Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, audit internal digambarkan sebagai aktivitas konsultasi independen yang dirancang untuk memperbaiki fungsi perusahaan melalui evaluasi sistematis dan peningkatan manajemen risiko serta pengelolaan perusahaan (Rahmadanti, 2021).

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada persentase saham perusahaan yang dikuasai oleh anggota manajemen yang memiliki peran langsung dalam proses pengambilan keputusan, termasuk para manajer. Ini mewujudkan fungsi ganda manajemen sebagai manajer dan pemegang saham, berkontribusi pada penentuan arah strategis perusahaan (Anita et al., 2022).

Menurut Ni Putu (2016), kepemilikan manajerial merujuk pada ekuitas perusahaan yang dikuasai oleh pihak manajemen, yang sekaligus

berperan sebagai pemilik serta berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis. Linata dan Sugiarto (2017) menegaskan bahwa kepemilikan manajerial mencakup persentase saham yang dimiliki oleh manajemen, yang mencakup komisaris dan direktur yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kartika (2020) selanjutnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial muncul ketika manajer memperoleh saham perusahaan, sehingga mencapai status pemegang saham.

Dalam konteks ini, kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan tetapi juga memiliki kepentingan sebagai pemilik, bersama dengan komisaris dan direktur.

Kepemilikan manajerial memberikan keuntungan karena manajer memiliki saham perusahaan, memotivasi mereka untuk bekerja lebih optimal demi meningkatkan nilai perusahaan dan menikmati hasil kepemilikan saham. Semakin besar porsi saham manajerial, semakin besar pula usaha mereka untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, menaikkan kepercayaan dan nilai perusahaan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Lembaga adalah entitas yang memiliki kepentingan signifikan dalam investasi, termasuk kepemilikan saham, dan biasanya mengalokasikan divisi khusus untuk manajemen mereka. Melalui pengawasan profesional, lembaga dapat melakukan kontrol ketat atas manajemen untuk mengurangi

kasus penipuan (Tabun et al., 2023). Investor institusional diklasifikasikan menjadi investor aktif, yang terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, dan investor pasif, yang tidak berpartisipasi secara langsung. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadikannya mekanisme pemantauan yang efektif (Yuestri & Saitri, 2020).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan asuransi, bank, atau perusahaan investasi, yang berfungsi mengurangi agency conflict melalui monitoring efektif untuk mencegah perilaku oportunistik manajer (Krisnando, 2017; Febrianto, 2020).

Menurut Dewi dan Subardjo (2020), kepemilikan institusional mencakup berbagai entitas yang memiliki saham dalam suatu perusahaan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, institusi asing, serta dana perwalian. Entitas-entitas tersebut memiliki peran dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan. Naufal (2020) mendefinisikannya sebagai proporsi saham institusi yang diukur pada akhir tahun, sementara Gunawan dan Wijaya (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawas aktivitas manajemen dalam struktur kepemilikan.

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dikuasai oleh lembaga tertentu dengan tujuan mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen. Kepemilikan ini berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta memperkuat

mekanisme kontrol melalui pengawasan profesional guna mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (Komang, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Anna Sukasih, Eko Sugiyanto (2017)	“Laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”	Independen: - Struktur <i>Good corporate governance</i> - Kinerja Lingkungan Dependen: - <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Struktur GCG berdampak negatif terhadap pelaporan CSR, sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh.
2.	Rosa Fitriana (2019)	“Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013”	Independen: - Kepemilikan Institusional - Profitabilitas - Ukuran Perusahaan Dependen: - Pengungkapan CSR	Kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan secara parsial berdampak positif signifikan terhadap pelaporan CSR.
3.	Vivi Andayani, Irdha Yusra (2019)	“Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015”	Independen: - Kepemilikan Institusional - Komite Audit Dependen: - Pengungkapan CSR	Kepemilikan institusional dan komite audit berdampak positif namun tidak signifikan terhadap pelaporan CSR.
4.	Padma Adriana Sari, Berlia Tri Handini (2021)	“Perusahaan sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Independen: - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dependen:	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berdampak positif signifikan terhadap pelaporan CSR.

		selama periode 2014-2018”	Pengungkapan CSR	
5.	Muhammad Fiki Firmansyah, Lintang Venusita (2021)	“Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 dari laman media resmi BEI”	Independen: - Pengungkapan CSR Dependen: - <i>Business Going Conce</i> Kepemilikan institusional sebagai variable moderasi	Pelaporan CSR berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis; kepemilikan institusional memoderasi hubungan CSR dan keberlangsungan bisnis.
6.	Findy Safitry, A.Zubaidi Indra, Yenni Agustina (2022)	“Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019”	Independen: - Struktur Kepemilikan-Dewan Komisaris - <i>Leverage</i> , Dependen: Pengungkapan CSR	Struktur kepemilikan berdampak positif signifikan, dewan komisaris berdampak negatif signifikan, leverage (DER) tidak berdampak terhadap pelaporan CSR.
7.	Rendy Marcelino (2022)	“ <i>Data time series</i> dari populasi perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017- 2021”	Independen: - Kepemilikan Manajerial - Komite Audit - Dewan Komisaris - <i>Profitability</i> - <i>Leverage</i> Dependen: CSR	Leverage berdampak signifikan terhadap CSR, sedangkan kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris, dan profitability tidak berdampak signifikan.
8.	Lily Fanny Br Sitepu, Dompok Pasaribu, Ivo Maclina Silitonga (2023)	“Perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	Independen: - Komite Audit - Kepemilikan Manajerial - <i>Free Cash Flow</i> - Ukuran Perusahaan Dependen: CSR	Komite audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berdampak secara parsial terhadap CSR, free cash flow tidak berdampak; secara simultan semua variabel memberikan dampak terhadap CSR.

Merujuk pada tabel yang telah disajikan sebelumnya, perbedaan utama terletak pada kombinasi variabel yang digunakan. Studi ini secara

khusus menyoroti efektivitas dewan komisaris, peran komite audit, serta kepemilikan manajerial dan kelembagaan sebagai faktor utama yang dianalisis dalam hubungannya dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak memasukkan aspek keuangan atau lingkungan, penelitian ini berfokus pada bagaimana tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan secara langsung memengaruhi implementasi CSR.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dewan komisaris merupakan elemen penting dalam pengendalian internal perusahaan, memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen terkait isu akuntansi, keuangan, dan operasional. Mereka juga memastikan perusahaan menerapkan bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan tanggung jawab sosial.

Keefektifan dewan komisaris dapat memberikan dampak signifikan terhadap CSR. Dewan komisaris yang efektif menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup tanggung jawab sosial, memantau kinerja CSR, dan memastikan program dilaksanakan sesuai standar untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Mereka juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR, mempertimbangkan risiko terkait, dan membantu membangun reputasi perusahaan di mata stakeholders, termasuk pelanggan, investor, dan masyarakat luas.

Pengaruh positif dewan komisaris terhadap CSR didukung oleh jumlah anggota yang lebih banyak, memudahkan pengendalian CEO dan pelaksanaan fungsi

monitoring secara efektif (Fauzyyah & Rachmawati, 2018; Asahra & Pesudo, 2023). Berdasarkan uraian ini, hipotesis penelitian dirumuskan yakni:

“H1: Dewan Komisaris memiliki dampak yang positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*”

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Komite audit bertugas membantu pengawasan manajemen perusahaan. Keaktifan komite audit dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, termasuk terhadap praktik dan pelaporan CSR. Penelitian terdahulu menunjukkan dampak positif yang signifikan oleh komite audit signifikan terhadap pelaporan CSR. CSR menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis, berfungsi sebagai strategi untuk memenuhi kepentingan stakeholders dan mempertahankan citra positif di mata masyarakat dan investor.

Komite audit bertanggung jawab menilai risiko terkait CSR, seperti risiko reputasi, hukum, dan operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelaporan CSR. Mereka menjamin bahwa laporan CSR disusun sesuai pedoman, bebas dari pelanggaran, dan mencerminkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan kepada stakeholders eksternal. Komite audit juga memastikan kualitas pelaporan CSR dalam hal akurasi, kelengkapan, dan relevansi, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan CSR.

Penelitian Fauzyyah & Rachmawati (2018) dan Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pelaporan CSR dan Sustainability Reporting (SR). Berdasarkan penjelasan dan dukungan penelitian sebelumnya, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

“H2: Komite Audit memiliki dampak yang positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*”

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Kepemilikan manajerial mengacu pada individu yang berperan ganda sebagai investor sekaligus pemilik perusahaan, di mana mereka memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi (Rivandi, 2020). Semakin besar porsi saham manajerial, semakin proaktif mereka dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham, meningkatkan kepercayaan dan nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial dapat memberikan dampak signifikan terhadap CSR. Manajer dengan saham besar cenderung mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan, termasuk menjaga reputasi dan citra melalui CSR, karena mereka memiliki kepentingan langsung dalam kinerja masa depan. Namun, jika kepemilikan manajerial minoritas dan didominasi oleh pemegang saham mayoritas atau institusi, pengaruhnya terhadap CSR bisa terbatas.

Kepemilikan manajerial dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap pelaporan CSR, tergantung pada kepentingan yang diutamakan manajer (Asahra & Pesudo, 2023). Namun, Safitry dkk. (2022) menyatakan bahwa CSR

dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Berdasarkan uraian dan dukungan penelitian sebelumnya, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

“H3: Kepemilikan Manajerial memiliki dampak yang positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*”

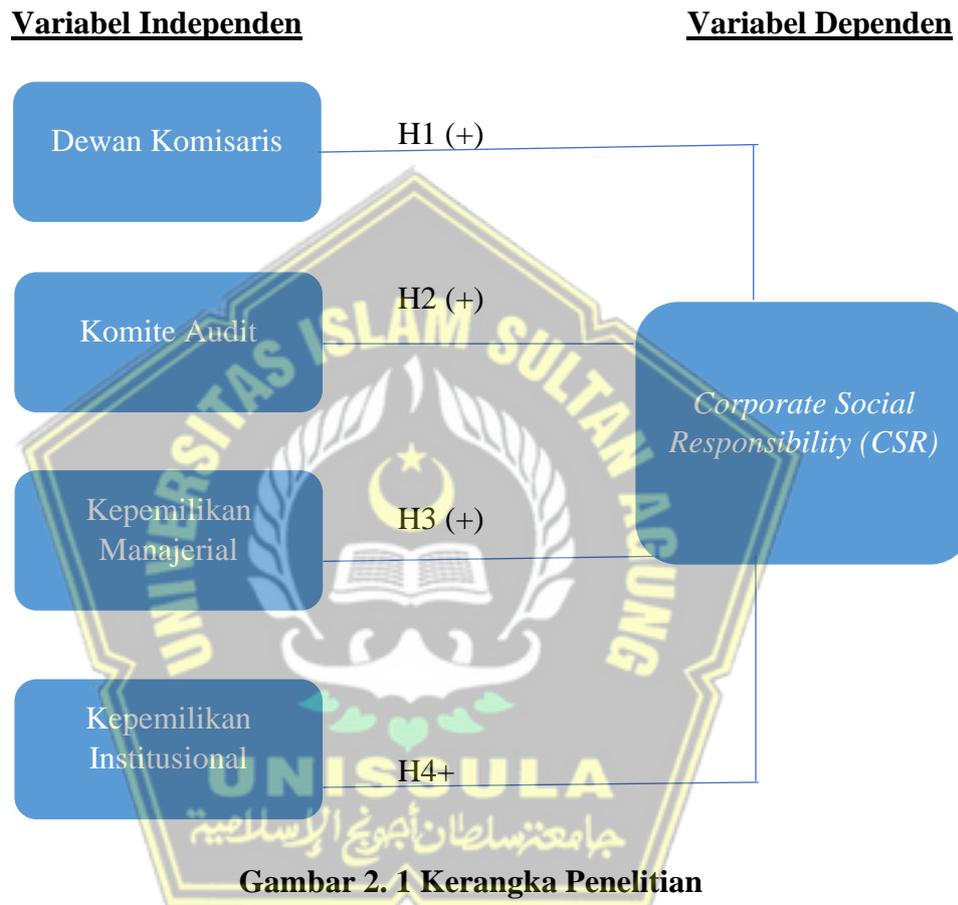
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Kepemilikan saham oleh lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi berperan signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan CSR. Kepemilikan institusional yang substantif memfasilitasi entitas yang kuat untuk mempromosikan praktik CSR yang ditingkatkan. Lembaga yang dicirikan oleh perspektif jangka panjang cenderung mendukung inisiatif CSR berkelanjutan untuk menambah nilai perusahaan. Sebaliknya, lembaga yang memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek atau terlibat dalam industri yang kontroversial (misalnya, bahan bakar fosil) dapat menunjukkan dukungan yang berkurang untuk CSR.

Kepemilikan institusional dan komite audit menunjukkan korelasi positif yang signifikan secara statistik dengan pelaporan CSR. Peningkatan proporsi saham kelembagaan dan ukuran komite audit berkorelasi dengan semakin banyak indikator CSR yang dilaporkan sesuai dengan GRI G4 (Sari et al., 2021). Fitriana (2019) dan Rivandi (2020) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan kelembagaan secara positif dan signifikan mempengaruhi pelaporan CSR. Mengambil dari penjelasan dan penguatan penelitian sebelumnya, hipotesis diartikulasikan sebagai berikut:

“H4: Kepemilikan Institusional memiliki dampak yang positif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*”

2.4. Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dirancang secara terorganisir, terarah, dan memiliki struktur yang jelas sejak tahap perencanaan hingga penyusunan desain penelitian secara keseluruhan.

3.2 Populasi dan Sampel

Seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi cakupan populasi dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik seleksi sampel yang mempertimbangkan ketersediaan data serta kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria tersebut mencakup:

- 1) Entitas manufaktur yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.
- 2) Badan usaha yang secara berkesinambungan merilis laporan tahunan yang telah melalui proses audit selama periode 2021–2023 di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Perusahaan yang menyusun laporan keuangan tahunan dalam denominasi rupiah guna menghindari ketidaktepatan data akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
- 4) Perusahaan yang menyediakan data yang diperlukan untuk mengukur variabel dependen dan independen dalam penelitian ini.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder digunakan untuk melakukan penelitian. Data didapatkan melalui dari situs www.idx.co.id dan bersumber dari laporan keuangan terpublikasi pada periode 2021-2023.

Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku dan referensi lain yang relevan dengan studi ini digunakan sebagai data sekunder.

Jenis data yang dimanfaatkan meliputi:

- 1) Data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dan disusun dari perusahaan untuk dianalisis, sehingga memberikan gambaran jelas tentang objek penelitian.
- 2) Data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka.

3.4 Metode Pengumpulan data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Data secara sistematis diproses menjadi informasi untuk mengevaluasi hipotesis penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metodologi utama:

- 1) Pengumpulan data empiris, yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang berisi informasi keuangan dan operasional yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Studi pustaka, yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang mendukung analisis serta pembahasan studi.

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen mewakili variabel-variabel yang tunduk pada pengaruh variabel lain. Dalam penyelidikan ini, variabel dependen yang diidentifikasi adalah Corporate Social Responsibility (CSR), yang dinilai melalui indikator spesifik yang menggambarkan tingkat keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR. Indikator tersebut meliputi pemanfaatan sumber energi terbarukan, volume limbah yang dihasilkan dan dikelola, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, inisiatif keselamatan kerja, upaya filantropi, serta kebijakan transparansi dalam mengungkapkan kegiatan CSR. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berperan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas dewan komisaris, kinerja komite audit, serta pengaruh kepemilikan manajerial dan institusional terhadap akuntabilitas perusahaan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 (UUPT) Tahun 2007. Regulasi ini menegaskan bahwa CSR ialah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Implementasi CSR diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi komunitas di sekitarnya (Fajar, 2010). Metrik untuk menilai CSR dalam penelitian ini meliputi:

$$CSR = \frac{\text{Total Item yang diungkapkan}}{\text{Total Item Pengungkapan}} \quad (1)$$

3.5.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2019), variabel independen ialah unsur yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor yang berperan sebagai variabel independen mencakup:

a. Dewan Komisaris (X1)

Dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal utama yang bertugas mengawasi tindakan manajemen senior (Fama & Jensen, 1983). Sebagai sebuah badan dalam struktur perusahaan, dewan komisaris memiliki kewajiban bersama dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan strategis kepada direksi, serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Besarnya dewan komisaris ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

$$UDK = \Sigma \text{Dewan Komisaris} \quad (2)$$

b. Komite Audit (X2)

Komite audit diberi mandat untuk mempertahankan independensi, dengan independensi tersebut secara inheren terkait dengan integritas moral sebagai fondasinya. Komite audit bertindak sebagai perantara antara auditor eksternal dan korporasi, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris dan auditor internal. Jumlah anggota yang membentuk komite audit dalam suatu perusahaan digunakan sebagai indikator untuk mengukur ukuran komite audit:

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Anggota Komite Audit} \quad (3)$$

c. Kepemilikan Manajerial (X3)

Kepemilikan manajerial berkaitan dengan kepemilikan saham oleh sektor manajemen perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Jensen (1986), peningkatan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen berkorelasi positif dengan kemungkinan menyalarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Kuantifikasi kepemilikan manajerial dilaksanakan melalui penerapan rumus berikut:

$$KM = \frac{\text{Proporsi Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\% \quad (4)$$

d. Kepemilikan Institusional (X4)

Kepemilikan saham dapat dikaitkan dengan lembaga atau entitas. Kepemilikan tersebut memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan, metodologi investasi, dan proses pengambilan keputusan karena volume saham yang besar, sehingga mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Metrik untuk menilai kepemilikan institusi adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Proporsi Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\% \quad (5)$$

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode analisis yang berfokus pada penyajian dan peringkasan data secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam (Walpole, Ronald, & Raymond, 1995). Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai suatu fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel atau populasi yang diteliti (Sugiyono, 2019).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model prediktif dianggap efektif jika memiliki atribut estimator linier yang tidak bias terbaik (Gujarati, 2015). Selanjutnya, model harus sesuai dengan uji asumsi klasik agar dapat diterapkan untuk tujuan prediktif. Fase yang terlibat dalam tes asumsi klasik meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Tes normalitas berfungsi sebagai instrumen statistik untuk mengevaluasi apakah distribusi data dalam penelitian mematuhi distribusi normal (Wahyuni & Harto, 2012). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa residu atau variabel perturbatif dalam kerangka regresi menunjukkan distribusi normal (Ghozali, 2021). Metodologi yang digunakan mencakup analisis grafis dan pengujian statistik formal (Ghozali, 2021).

Tes Kolmogorov-Smirnov non-parametrik digunakan untuk menilai normalitas data penelitian. Kriteria untuk tes menetapkan bahwa jika nilai signifikansi adalah < 0.05 , the data is classified as non-normal; conversely, if $> 0,05$, data dianggap normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah ada korelasi di antara variabel independen atau jika satu variabel independen mewakili fungsi linier dari variabel lain (Ghozali, 2021). Dalam kasus multikolinearitas yang signifikan, kesalahan standar koefisien regresi diperkuat, menghasilkan interval kepercayaan yang diperluas. Deteksi dijalankan melalui Variance

Inflation Factor (VIF): VIF melebihi 10 menunjukkan adanya multikolinearitas; jika di bawah 10, multikolinearitas tidak ada.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dilakukannya uji heteroskedastisitas terhadap data memiliki tujuan memeriksa ada atau tidaknya variansi yang tidak sama antar residual pada model regresi (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas terjadi jika variasi residual berubah sistematis seiring perubahan variabel independen, menyebabkan estimasi bias dan membuat uji t, F, serta nilai variabel dependen tidak valid.

Uji ini menggunakan metode Spearman Rho dengan mengkorelasikan rank Spearman dari nilai absolut variabel independen. Kriteria: jika signifikansi $> 0,05$, tidak ada heteroskedastisitas; jika $< 0,05$, ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu periode tertentu (t) dengan residual pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier (Ghozali, 2021). Jika hubungan tersebut terdeteksi, maka dapat disimpulkan bahwa autokorelasi terjadi dalam model.

Uji ini menelaah keterkaitan antar variabel dalam kerangka prediksi berdasarkan rentang waktu. Jika autokorelasi terwujud, maka nilai pengganggu tidak dapat dianggap saling lepas satu sama lain. Pelaksanaan pengujian ini dilakukan melalui metode Durbin-Watson (DW) dengan pedoman kriteria sebagai berikut:

1. Hipotesis nol hendak ditolak bila nilai *Durbin-Watson* kurang dari dL atau lebih besar dari (4- dL), menampilkan terdapatnya autokorelasi.
2. Hipotesis nol diterima bila hasil *Durbin-Watson* antara dU serta (4- dU), menampilkan tidak terdapatnya autokorelasi.
3. Hasil *Durbin-Watson* tidak hendak membagikan jawaban konklusif jika terletak di antara dL serta dU ataupun antara (4- dU) dan (4- dL).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam upaya menguji hipotesis yang diajukan, diterapkan metode analisis regresi linier berganda guna mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linier berganda yang digunakan dapat dirumuskan :

$$[Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e] \quad (6)$$

Keterangan:

Y = Corporate Social Responsibility (CSR)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Dewan Komisaris

X_2 = Komite Audit

X_3 = Kepemilikan Manajerial

X_4 = Kepemilikan Institusional

e = Error term (unsur gangguan)

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan pada bab sebelumnya diuji melalui langkah-langkah berikut:

3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R²)

Statistik R² mencerminkan persentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari nilai R², seseorang dapat memastikan sejauh mana variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, dengan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor asing di luar model. Kontribusi yang meningkat menandakan model penelitian yang lebih kuat.

3.6.4.2 Uji Statistik F

Tujuan dari tes ini adalah untuk menilai apakah variabel independen secara kolektif memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, sebagaimana ditentukan oleh statistik F atau signifikansi (sig) dalam tabel ANOVA. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Apabila sig < α , maka H₀ diterima.
2. Apabila sig > α , maka H₀ ditolak.

3.6.4.3 Uji Statistik t

Uji t statistik mengevaluasi dampak parsional dari setiap variabel independen pada variabel dependen, berdasarkan statistik t atau signifikansi (sig) yang disajikan dalam tabel koefisien. Kriteria digambarkan sebagai berikut:

1. Apabila sig < α , maka H₀ diterima.
2. Apabila sig > α , maka H₀ ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur tata kelola perusahaan, yang mencakup dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional, terhadap praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Studi ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan, yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia serta laman resmi masing-masing perusahaan.

Penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2021 hingga 2023, dengan total keseluruhan sebanyak 227 perusahaan. Metode pemilihan sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, dengan hasil seleksi yang dijelaskan :

Tabel 4. 1
Kriteria Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi: perusahaan yang manufaktur yang terdaftar di BEI	227
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>Purposive Sampling</i>)	
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021–2023.	(-32)

2. Perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2021–2023 di Bursa Efek Indonesia.	(-14)
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah untuk mencegah ketidakakuratan data akibat naik-turun harga pertukaran uang asing.	(-7)
4. Perusahaan yang menyediakan data yang diperlukan untuk mengukur variabel dependen dan independen dalam penelitian ini.	(-89)
Sampel penelitian	85
Total data observasi selama 3 tahun ($n \times \text{periode penelitian}$) = (85 x 3)	255

Sumber: [www. Idx.co.id](http://www.idx.co.id)

4.2 Deskripsi Variabel

Analisis data ini bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil analisis deskriptif dengan menentukan nilai rata-rata, batas maksimum dan minimum, serta standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti. Statistik deskriptif untuk variabel bebas dan variabel terikat disajikan dalam tabel berikut guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik data yang dianalisis:

Tabel 4. 2
Data Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimal	Maximal	Mean	Standard Deviasi
Dewan Komisaris	225	2	9	4	0,12792
Komite Audit	225	2	5	3	0,00946
Kep. Manajerial	225	0	56,23	3,02	0,52501
Kep. Institusional	225	0,58	99,42	76,34	1,22691
CSR	225	0,128	0,801	0,45	0,01167

Sumber: *Data Sekunder diolah, 2024*

Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai rerata 4 dimana deviasi standarnya 0,12792. Nilai rerata yang jauh lebih tinggi dibandingkan deviasi standarnya menandakan adanya keseragaman dalam jumlah anggota dewan komisaris di berbagai perusahaan. Rentang antara 2 hingga 9 orang menunjukkan adanya standar tertentu dalam struktur pengawasan, dengan mayoritas perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang mendekati nilai rerata tersebut.

Variabel Komite Audit mencatatkan rerata 3 anggota dengan deviasi standar yang sangat kecil, yaitu 0,00946, mengindikasikan tingkat konsistensi yang tinggi dalam jumlah anggota komite audit. Rentang antara 2 hingga 5 anggota mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan perusahaan. Sebagian besar perusahaan memilih jumlah anggota ganjil untuk mempermudah pengambilan keputusan, kecuali PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang memiliki 2 anggota dan PT Astra International Tbk dengan 4 anggota.

Variabel Kepemilikan Manajerial menunjukkan rerata sebesar 3,02% dengan deviasi standarnya 0,52501. Deviasi standar yang lebih besar dari rerata menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam kepemilikan saham oleh manajemen. Rentang dari 0% hingga 56,23% menggambarkan bahwa beberapa perusahaan tidak memiliki kepemilikan manajerial sama sekali, sementara yang lain memiliki porsi kepemilikan yang cukup besar, mencerminkan praktik yang tidak seragam.

Variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan rerata 76,34% dengan deviasi standar 1,22691. Rerata yang tinggi ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mendominasi di perusahaan-perusahaan sampel. Rentang dari 0,58%

hingga 99,42% menunjukkan adanya variasi yang besar, namun deviasi standarnya yang relatif kecil mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional pada tingkat tinggi cukup konsisten di sebagian besar perusahaan.

Variabel CSR menunjukkan rerata 0,45 dengan deviasi standarnya 0,01167. Nilai rerata yang lebih besar dibandingkan dengan deviasi standarnya menandakan bahwa tingkat pelaporan CSR relatif seragam di antara perusahaan sampel. Rentang dari 0,128 hingga 0,801 menunjukkan bahwa ada perusahaan dengan pelaporan CSR yang sangat minim, sementara lainnya mencapai hampir 80,1% dari indikator yang diukur, mengindikasikan konsistensi dengan sedikit variasi.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi data, khususnya dalam menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Uji normalitas dalam studi ini diterapkan melalui metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Berdasarkan kriteria yang digunakan, data dikategorikan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal. Hasil analisis secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3

Tabel Data Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		255
Normal Paramaters ^{a,b}	Mean	0,0000000

	Std. Deviation	0,15230530
Most Extreme Differences	Absolute	0,131
	Positive	0,131
	Negative	-0,067
Test Statistic		0,131
Asymp. Sig (2-tailed)		0,073^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Dari tabel, nilai Signifikansi Asimptotik (2-ekor) adalah 0,073, yang melebihi ambang 0,05 (Basuki, 2019). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis dalam penelitian ini mematuhi distribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Prosedur analitik ini dirancang untuk memastikan keberadaan korelasi signifikan antara variabel independen dalam kerangka regresi, dievaluasi melalui parameter Faktor Inflasi Varians (VIF) dan nilai toleransi. Nilai VIF yang kurang dari 10, bersamaan dengan toleransi melebihi 0,10, menunjukkan tidak adanya multikolinieritas (Basuki, 2019). Temuan dari analisis digambarkan dalam tabel berikutnya:

Tabel 4. 4
Data Uji Multikolinieritas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Dewan Komisaris	0,980	1,021
Komite Audit	0,906	1,103
Kepemilikan Manajerial	0,998	1,002
Kepemilikan Institusional	0,915	1,093

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Semua nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1, sehingga mengkonfirmasi tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tes heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan adanya perbedaan varians di antara residu dalam model regresi (Ghozali, 2018). Metode Spearman Rho digunakan, dengan kriteria yang menetapkan bahwa jika nilai signifikansi melebihi 0,05, heteroskedastisitas tidak ada; sebaliknya, jika turun di bawah 0,05, heteroskedastisitas hadir. Hasil analisis ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5
Data Uji Heteroskedastisitas

			Unstandarized Residual
Spearman's rho	Dewan Komisaris	Correlation Coefisient	0,016
		Sig. (2-tailed)	0,891
		N	255
	Komite Audit	Correlation Coefisient	0,059
		Sig. (2-tailed)	0,601
		N	255
	Kep. Manajerial	Correlation Coefisient	0,018
		Sig. (2-tailed)	0,873
		N	255
	Kep. Institusional	Correlation Coefisient	0,044
		Sig. (2-tailed)	0,698
		N	255

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Nilai signifikansi untuk semua variabel melebihi 0,05 (dewan komisaris: 0,891; komite audit: 0,601; kepemilikan manajerial: 0,873; kepemilikan

kelembagaan: 0,698). Akibatnya, kumpulan data tidak memiliki heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Penilaian ini dilakukan untuk menganalisis korelasi antara periode waktu T dan periode sebelumnya ($t-1$). Jika model regresi menunjukkan kebebasan dari autokorelasi, itu dapat diklasifikasikan sebagai model regresi yang kuat, seperti yang diidentifikasi oleh uji Durbin-Watson (DW). Kondisi yang diperlukan menetapkan bahwa DU harus kurang dari DW dan DW harus kurang dari 4 minus DU . Temuan disajikan dalam tabel berikutnya.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.164	0.027	-0,022	1,381	2,093

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Statistik DW tercatat di 2.093. Dengan N setara dengan 255, k sama dengan 4, dan tingkat signifikansi 0,05, DU dihitung menjadi 1.81706, sedangkan $4-DU$ sama dengan 2.18294, DL adalah 1.76851, dan $4-DL$ berjumlah 2.23149. Nilai DW (2.093) terletak antara DU (1.81706) dan $4-DU$ (2.18294), sehingga menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

4.4 Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Prosedur analitis dilakukan untuk memastikan apakah variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen. Hasilnya digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4. 7
Data Uji Autokorelasi

Model	Unstandardized B	Coefficient Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	24,023	17,462		1,376	0,171
X1	1,241	1,667	0,074	0,744	0,458
X2	-0,058	0,081	-0,063	-0,723	0,471
X3	-0,235	0,073	-0,290	-3,207	0,002
X4	-0,090	0,065	-0,134	-1,384	0,169

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Dari interpretasi persamaan regresi, terbukti bahwa konstanta (a) memiliki nilai 24,023. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan kelembagaan dinilai nol (0), akan ada peningkatan Tanggung Jawab Soal Perusahaan. Koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris (X1) adalah 1,241, untuk komite audit (X2) adalah -0,058, untuk kepemilikan manajerial (X3) adalah -0,235, dan untuk kepemilikan kelembagaan (X4) adalah -0,090. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut (Basuki, 2019):

$$Y = 24,023 + 1,241 X_1 - 0,058 X_2 - 0,235 X_3 - 0,090 X_4 + e$$

Persamaan tersebut memiliki arti:

- 1) Konstanta *Corporate Social Responsibility* (Y) memiliki nilai sebesar 24,023 menunjukkan bahwa jika keempat variabel bernilai nol, maka *Corporate Social Responsibility* akan meningkat sebesar 24,023.
- 2) Koefisien X1 memiliki nilai 1,241 menandakan untuk setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel dewan komisaris (X1) akan

meningkatkan *Corporate Social Responsibility* sebesar 1,241, atau sebaliknya jika terjadi penurunan.

- 3) Koefisien X2 memiliki nilai -0,058 mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel komite audit (X2) akan menyebabkan penurunan *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,058, atau sebaliknya jika terjadi penurunan.
- 4) Koefisien X3 memiliki nilai -0,235 berarti untuk setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel kepemilikan manajerial (X3) akan mengurangi *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,235, atau sebaliknya jika terjadi penurunan.
- 5) Koefisien X4 memiliki nilai -0,090 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel kepemilikan institusional (X4) akan menurunkan *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,090, atau sebaliknya jika terjadi penurunan.

4.5 Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengevaluasi dampak parsional variabel independen pada variabel dependen. Hasilnya diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8

Data Uji t

Variabel	t	Signifikansi	Keterangan
Dewan Komisaris (X1)	0,074	0,458	
Komite Audit (X2)	0,063	0,471	
Kepemilikan Manajerial (X3)	0,290	0,002	
Kepemilikan Institusional	0,134	0,169	

(X4)			
------	--	--	--

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Hasil uji signifikansi individual mengacu pada data hasil uji t pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk pengaruh dewan komisaris (X1) terhadap *Corporate Social Responsibility* (Y), hasil uji t memiliki nilai signifikansi 0,458, yang lebih besar dari 0,05 ($0,458 > 0,05$), sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan pelaporan CSR. Meskipun dewan komisaris berperan dalam pengawasan kebijakan perusahaan, hasil ini mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti regulasi pemerintah atau tekanan pemegang saham, lebih menentukan tingkat pelaporan CSR dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris itu sendiri.
2. Sementara itu, variabel Komite Audit (X2) memiliki nilai signifikansi 0,471, yang juga lebih besar dari 0,05 ($0,471 > 0,05$), sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR. Komite audit memang berperan dalam memastikan transparansi laporan keuangan dan pengelolaan perusahaan, tetapi hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak berdampak langsung terhadap pelaporan CSR. Kemungkinan besar, fokus utama komite audit lebih tertuju pada kepatuhan terhadap regulasi akuntansi dan pelaporan keuangan, bukan pada strategi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, keputusan terkait CSR lebih mungkin dipengaruhi oleh kebijakan internal

perusahaan atau faktor eksternal, seperti tekanan dari pemangku kepentingan dan regulasi.

3. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, variabel Kepemilikan Manajerial (X3) memiliki nilai signifikansi 0,002, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap CSR. Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa manajemen juga memiliki saham dalam perusahaan, yang membuat mereka lebih peduli terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, termasuk pelaporan CSR. Manajemen yang memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan melalui pelaporan CSR yang lebih baik. Selain itu, CSR dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya akan menguntungkan pemegang saham, termasuk manajemen itu sendiri..
4. Terakhir, variabel Kepemilikan Institusional (X4) memiliki nilai signifikansi 0,169, dimana itu lebih tinggi dari 0,05 ($0,169 > 0,05$), artinya tidak memiliki pengaruh signifikan pada CSR. Meskipun investor institusional sering dianggap memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional tidak serta-merta meningkatkan pelaporan CSR. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa banyak investor institusional lebih fokus pada keuntungan finansial dan Return On Investment (ROI) daripada pada aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, tidak semua investor institusional memiliki

kepedulian yang sama terhadap CSR beberapa mungkin lebih menekankan pada aspek profitabilitas, sementara yang lain bisa saja lebih peduli terhadap keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelaporan CSR dalam perusahaan lebih mungkin dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan, regulasi pemerintah, atau tekanan dari konsumen dibandingkan dengan pengaruh pemegang saham institusional.

Secara keseluruhan, keluaran Uji t mengindikasikan bahwa dari keempat variabel yang diuji, terhadap CSR hanya kepemilikan manajerial yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan “dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional” tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan langsung manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan lebih efektif dalam mendorong peningkatan pelaporan CSR dibandingkan dengan faktor struktural lainnya, seperti keberadaan dewan komisaris atau komite audit.

4.6 Pengujian Koefisien Determinasi

Tingkat ketepatan suatu model dapat dievaluasi menggunakan koefisien determinasi (R^2), yang menggambarkan sejauh mana model regresi mampu menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiharti, 2021). Ketika nilai R^2 mendekati satu, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat (Mukhtaruddin, 2019). Adapun hasil dari perhitungan koefisien determinasi disajikan yakni:

Tabel 4. 9
Data Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,321	0,103	0,065	7,66745

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Koefisien penentuan yang diperoleh adalah 0,031, setara dengan 6,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh empat variabel independen pada Tanggung Jawab Soal Perusahaan hanya 6,5%, dengan sisa 93,5% (100% - 6,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility*

Menurut temuan penelitian ini, dewan komisaris tidak memberikan efek signifikan secara statistik terhadap Tanggung Jawab Soal Perusahaan (CSR), karena uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi 0,458, melampaui ambang kritis 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) ditolak, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak secara statistik mempengaruhi pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Temuan selaras dan konsisten jika dibandingkan kepada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Olivia Oktafiana dalam studinya juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki korelasi signifikan dengan CSR (Oktafiana, 2020). Demikian pula, Suci Lidya Ningsih melalui analisis mendalam menegaskan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti antara dewan komisaris dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (Ningsih, 2019).

Salah satu alasan utama dari temuan ini adalah sifat peran dewan komisaris yang lebih struktural dan strategis, dengan fokus pada pengawasan umum

perusahaan, bukan pada inisiatif keberlanjutan secara langsung. Dewan komisaris biasanya hanya bertugas memantau keputusan manajemen tanpa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan CSR, kecuali ada tekanan eksternal atau regulasi yang memaksa mereka untuk lebih berperan.

Selain itu, di banyak perusahaan, fokus dewan komisaris lebih tertuju pada kepatuhan hukum dan pengelolaan perusahaan. Akibatnya, pelaporan CSR lebih bergantung pada inisiatif manajemen atau dorongan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, regulator, dan konsumen. Dengan kata lain, meskipun memiliki kewenangan strategis, dewan komisaris tidak selalu menjadi penggerak utama dalam kebijakan CSR.

4.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility*

Analisis statistik mengungkapkan bahwa komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Uji t menghasilkan nilai signifikansi 0,471, yang melebihi ambang kritis 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak, menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak memiliki efek statistik pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Temuan ini konsisten dengan beberapa studi yang telah dilakukan. Nasution dan Prasetyo dalam penelitian mereka membuktikan tidak terdapatnya korelasi yang signifikan antara komite audit dan CSR (Nasution dan Prasetyo, 2022). Senada dengan itu, Anis Sriwahyuni juga menyimpulkan bahwa komite audit belum mampu memengaruhi praktik tanggung jawab sosial perusahaan secara efektif (Sriwahyuni, 2022). Salah satu penyebabnya adalah fungsi utama komite audit yang lebih terpusat pada pengawasan laporan keuangan, kepatuhan hukum,

dan manajemen risiko, bukan pada pengelolaan aspek sosial perusahaan.

Komite audit biasanya bersifat lebih reaktif ketimbang proaktif dalam kebijakan perusahaan. Mereka lebih fokus memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta mencegah pelanggaran hukum, bukan merancang strategi CSR. Dalam beberapa kasus, meskipun komite audit ada, tidak ada kewajiban mereka untuk memastikan adanya kebijakan CSR yang kuat. Dengan demikian, keberadaan komite audit saja tidak cukup untuk meningkatkan pelaporan CSR, dan faktor lain seperti regulasi, tekanan pasar, atau strategi manajemen lebih berperan dalam mendorong inisiatif tersebut.

4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility*

Analisis statistik menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan berdampak pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Uji t menghasilkan nilai signifikansi 0,002, yang kurang dari ambang kritis 0,05. Akibatnya, hipotesis ketiga (H3) diterima, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki efek statistik pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Temuan sejalan dan sesuai jika melihat atau dibandingkan pada beberapa penelitian empiris sebelumnya. Vissha dalam studinya membuktikan adanya korelasi signifikan antara kepemilikan manajerial dan CSR (Vissha, 2019). Prasetyo juga menguatkan bahwa kepemilikan manajerial berperan penting dalam mendorong praktik tanggung jawab sosial perusahaan (Prasetyo, 2024). Penjelasan utama dari hasil ini adalah bahwa manajemen yang memiliki saham perusahaan memiliki kepentingan langsung, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan

citra perusahaan guna menjaga dan menaikkan nilai saham mereka.

CSR sering dipandang sebagai strategi jangka panjang yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mempererat hubungan dengan stakeholders, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Manajemen yang juga pemilik saham cenderung memiliki pandangan jangka panjang, sehingga lebih memperhatikan kebijakan CSR dibandingkan manajer yang hanya fokus pada hasil jangka pendek.

Kepemilikan manajerial juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR. Manajemen memiliki insentif untuk memastikan kebijakan keberlanjutan dilaksanakan dengan baik, bukan sekadar formalitas. Oleh karena itu, keterlibatan langsung manajemen dalam kepemilikan saham menjadi faktor penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas CSR.

4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan kelembagaan tidak menunjukkan efek signifikan secara statistik terhadap Tanggung Jawab Perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh analisis statistik yang dilakukan. Hasil uji-t menghasilkan nilai signifikansi 0,169, yang melampaui ambang kritis 0,05. Akibatnya, hipotesis keempat (H4) telah ditolak, menandakan bahwa variabel kepemilikan kelembagaan tidak memberikan pengaruh statistik pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

temuan konsisten jika dibandingkan kepada beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Irjayanti dalam studinya menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara kepemilikan institusional dan CSR (Irjayanti, 2014). Karmilayani dan Damayanthi juga menguatkan bahwa kepemilikan institusional

belum efektif memengaruhi praktik tanggung jawab sosial perusahaan (Karmilayani dan Damayanthi, 2016). Salah satu alasan utamanya adalah bahwa tidak semua investor institusional memprioritaskan keberlanjutan atau tanggung jawab sosial.

Beberapa investor institusional, seperti Hedge Funds atau Private Equity Firms, lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan Return On Investment (ROI), sehingga kurang peduli pada kebijakan CSR selama kinerja keuangan tetap baik. Dalam beberapa kasus, investor institusional mungkin hanya memiliki kepemilikan pasif tanpa aktif memengaruhi strategi perusahaan, termasuk CSR.

Selain itu, kepemilikan institusional yang besar sering kali mencerminkan diversifikasi kepemilikan, yang menyulitkan pembentukan konsensus mengenai pentingnya CSR. Ketika saham dimiliki oleh berbagai institusi dengan kepentingan beragam, pengambilan keputusan terkait CSR menjadi lebih rumit. Meskipun kepemilikan institusional sering dikaitkan dengan tata kelola yang lebih baik, hal ini tidak selalu mendorong peningkatan pelaporan CSR.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa peran investor institusional dalam mendukung praktik tanggung jawab sosial masih perlu diteliti lebih lanjut. Perusahaan yang ingin meningkatkan CSR mungkin perlu lebih mengandalkan kebijakan internal atau insentif lain, bukan hanya mengharapkan pengaruh dari kepemilikan institusional sebagai pendorong utama kebijakan keberlanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyelidiki dampak mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari analisis dan diskusi yang dilakukan, kesimpulan berikut dapat diartikulasikan:

1. Dewan Komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap CSR. Ini menyiratkan bahwa kehadiran dewan komisaris dalam suatu organisasi tidak cukup signifikan untuk meningkatkan pelaporan CSR. Dengan kata lain, peran mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan gagal secara langsung memperkuat inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Komite Audit juga tidak mempengaruhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama komite audit sebagian besar berpusat pada pengawasan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, bukan manajemen dimensi sosial perusahaan.
3. Kepemilikan manajerial telah ditemukan secara positif mempengaruhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Secara khusus, peningkatan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen berkorelasi dengan kecenderungan yang meningkat bagi perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Keterlibatan manajemen sebagai pemegang saham mempromosikan fokus pada kepentingan jangka panjang organisasi, terutama

mengenai keberlanjutan.

4. Kepemilikan Institusional tidak menunjukkan dampak apa pun pada Tanggung Jawab Soal Perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada investor institusi sebagai pemegang saham di perusahaan, mereka tidak selalu termotivasi untuk mempengaruhi kebijakan CSR. Prioritas mereka tampaknya lebih berorientasi pada pertimbangan keuangan daripada keberlanjutan perusahaan.

5.2 Implikasi

Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman teoritis tentang elemen-elemen yang mempengaruhi Tanggung Jawab Soal Perusahaan. Melalui analisis yang ketat, penelitian menjelaskan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola perusahaan memberikan pengaruh langsung pada praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Khususnya, kepemilikan manajerial telah diidentifikasi memiliki peran penting dalam mempromosikan pelaporan CSR, sedangkan mekanisme lain, seperti dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan kelembagaan, belum menunjukkan dampak yang berarti. Selain itu, perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan untuk meningkatkan keterlibatan pemilik manajemen dalam pengambilan keputusan terkait tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan partisipasi aktif manajemen dalam merancang dan mengimplementasikan program-program CSR yang lebih komprehensif dan bermakna. Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dinamika *Corporate Social Responsibility*. Tidak

sekadar memenuhi aspek formal, namun lebih pada substansi keterlibatan aktif manajemen dalam menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Studi ini mengakui keterbatasan tertentu yang harus dipertimbangkan untuk kemajuan penelitian di masa depan. Di antara keterbatasan yang diidentifikasi,

- 1) Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021-2023, yang merupakan masa pasca pandemi COVID-19. Pada periode ini, kondisi ekonomi masih dalam tahap pemulihan, sehingga dapat memengaruhi praktik pengelolaan perusahaan dan pelaporan tanggung jawab sosial. Dinamika ekonomi yang tidak stabil selama periode tersebut berpotensi memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya representatif dalam jangka panjang.
- 2) Analisis mengungkapkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh diklasifikasikan sebagai sederhana. Ini menunjukkan bahwa variabel independen yang diperiksa hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari variabilitas dalam variabel dependen. Keterbatasan tersebut menunjukkan potensi adanya faktor tambahan yang dapat mempengaruhi praktik manajemen perusahaan dan pelaporan tanggung jawab sosial yang tidak ditangkap dalam penelitian ini. Oleh karena itu, eksplorasi variabel tambahan yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif direkomendasikan untuk upaya penelitian di masa depan.

5.4 Saran

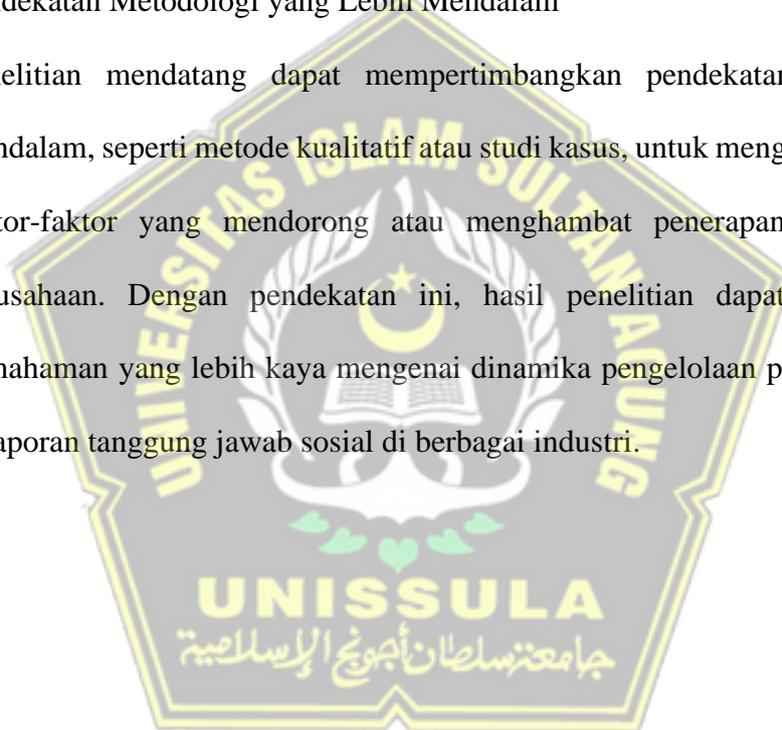
Berdasarkan keterbatasan penelitian teridentifikasi, peneliti mengajukan beberapa masukan untuk dilakukan pada penelitian lanjutan:

1. Perluasan Periode Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan, baik sebelum maupun setelah masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif dan representatif mengenai praktik pengelolaan perusahaan dan pelaporan tanggung jawab sosial dalam berbagai kondisi ekonomi.

2. Pendekatan Metodologi yang Lebih Mendalam

Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih mendalam, seperti metode kualitatif atau studi kasus, untuk menggali lebih jauh faktor-faktor yang mendorong atau menghambat penerapan CSR dalam perusahaan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai dinamika pengelolaan perusahaan dan pelaporan tanggung jawab sosial di berbagai industri.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, J. D., & Toly, A. (2014). PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. Dalam *TAX & ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 4, Nomor 1).
- Agustia, D. (2013). Pengaruh Faktor *Good corporate governance*, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1). <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.27-42>
- Andayani, V., & Yusra, I. (2019). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
- Asahra, A. S., & Pesudo, D. (2023). The Impact of Effectiveness of Board Commissioner, Audit Committee, Managerial Ownership, and Institutional Ownership on the *Corporate Social Responsibility*. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(2), 214–228. <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i2.2121>
- Ariani, R. A. N. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Manufaktur (Sektor Industri Barang Konsumsi) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal. 1-23.
- Choughri, R. (2018). The Role and Benefits of a *Corporate governance* Framework as a Risk Intelligence Success Factor for Large Enterprises in Mea Business Analytics Importance and Implementation View project Risk Management View Project the Role and Benefits of a Corporate Go. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) ISSN*, Vol. 7, hal. 50-55.
- Faishal, M., & Hadiprajitno, P. B. (2015). PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AUDIT REPORT LAG. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fajar, M. (2010). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*.
- Fama F, E., & Jensen C, M. (1983). *Pemisahan Kepemilikan dan Pengendalian*. Universitas Chicago Press.
- Fapila, A. I., & Zulaikha. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit dan Media *Exposure* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada

- Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 – 2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12 (1), 1-13.
- Fauzyyah, R., & Rachmawati, S. (2018). THE EFFECT OF NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, INDEPENDENT COMMISSIONERS, AUDIT COMMITTEE AND OWNERSHIP STRUCTURE UPON THE EXTENT OF CSR DISCLOSURE. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(02), 41. <https://doi.org/10.33062/ajb.v3i2.232>
- Febrianto, A. (2020). Director. (M. A. Yusuf, Interviewer) anak-anak. Gambar rumah. *Youtube NGAJAR*. Taman kanak-kanak. Jakarta.
- Fitriana, R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, Vol. VIII (2), hlm. 1-18.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10 edition). UNDIP.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hair et al. (1998). *Multivariate Data Analysis* (Fifth). Prentice Hall.
- Hamim, M., Anggreini, D. R., & Azmy, A. (2019). Effect of *Good corporate governance* on Company Profitability RE & Property Sector in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXIII (01), hal. 18-33.
- Hindriani, S. D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). Hal. 1-25.
- Ilmu, J., Sosial, K., Humanitas, Unpas, F., Octaviani, F., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2022). *Strategi Komunikasi dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. IV (1).
- Jensen M, C. (1986). *Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers*. American Economic.
- Karmudiandri, F. A. (2019). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN* (Vol. 21, Nomor 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Krisnando. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Dividen Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan

- Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 26 (01), hlm. 78-104.
- Marcelino, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Dewan Komisaris, *Profitability*, dan *Leverage* Terhadap CSR Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017- 2021. *Skripsi*, 1-152.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR. Vol. 9(2).
- Mardikanto Totok. (2018). *CSR Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marjuni, S. (2019). PEMERINTAHAN: PRESFEKTIF AGENCY THEORY. Vol. 5 (001).
- Murwaningsari, E. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Return Saham. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 12 (1), hlm. 45-60.
- Novianti, N., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 18(1), hal. 208-216.
- Prananta, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good corporate governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada PT. JBA Indonesia Cabang Tipar Cakung Periode 2019).
- Prasetyo, M. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15(2), hal. 61-69.
- Qur'anie, F. S. D. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Artikel Ilmiah*, hal. 1-20.
- Rahmadanti, S. (2021). Pengaruh Audit Internal, Komite Audit, *Whistleblowing System* dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Skripsi*, hlm. 1-102.
- Rahmatia, U., Hendra T. K., & Nurlaela, S. (2020). THE EFFECT OF MECHANISM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TO THE ACCURACY OF FINANCIAL REPORTING. Dalam *Pengaruh Mekanisme ... Jurnal EMBA* (Vol. 8, Nomor 1).
- Rivandi, M., & Putra, A. H. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris

- Perusahaan iHigh Profile di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. VIII (01), hal. 128-141.
- Rivandi, M. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan High Profile di BEI. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 13(2), hal. 205-220.
- Rusmana, A., et al. (2019). *The Future of Organizational Communication in The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi*. Bandung: Media Akselerasi.
- Safitry, F., Indra, A. Z., & Agustina, Y. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris, dan Leverage terhadap Pengungkapan Social Responsibility. *Review of Applied Accounting Research*, 2(2), 1–13. www.wartatambang.com
- Sari, P. A., dkk. (2021). *PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*. 12(2).
- Subiantoro, O. H., & Mildawati, T. (2015). *PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4(9).
- Sudarmanto, E., dkk. (2021). *Manajemen Konflik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tjondro, D., Wilopo Pascasarjana, R., Perbanas, S., Stie, S., & Surabaya, P. (2011). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PROFITABILITAS DAN KINERJA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA*. Dalam *Journal of Business and Banking* (Vol. 1, Nomor 1).
- Walpole. Ronald, E., & Raymond, H. M. (1995). *Ilmu Peluang Dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuawan* (4 edition). Bandung: ITB.
- Zuhriya, S., & Wahidahwati. (2015). *PERATAAN LABA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4(7).